



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.183, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Indeks Fiskal.
Kemiskinan Daerah. Perencanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 66/PMK.07/2011

TENTANG

**INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA
PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN
DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

TAHUN ANGGARAN 2012

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan.
6. Dana Urusan Bersama, yang selanjutnya disingkat DUB, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.

7. Dana Daerah untuk Urusan Bersama, yang selanjutnya disebut DDUB, adalah dana yang bersumber dari APBD.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Kemampuan Fiskal Daerah, yang selanjutnya disingkat KFD, adalah kemampuan keuangan daerah dan dana transfer ke daerah, dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah adalah suatu indikator umum yang menggambarkan kaitan antara ruang fiskal (*fiscal space*) daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
11. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi DUB serta penentuan besaran (persentase) penyediaan DDUB oleh daerah dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012.

BAB III

DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN

INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah.
- (2) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kemampuan keuangan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendapatan asli daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- (4) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus.
- (5) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
- (6) Persentase jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direpresentasikan melalui Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).

Pasal 4

- (1) Data kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD.
- (2) Data belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperoleh dari data perhitungan pengalokasian Dana Alokasi Umum.
- (3) Data dana transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diperoleh dari Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran transfer ke daerah.
- (4) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 5

- (1) Data fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2010.
- (2) Data non fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang digunakan adalah data tahun 2009.
- (3) Penggunaan periode data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada ketersediaan data.

BAB IV

FORMULA PERHITUNGAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD).
- (2) IRFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan KFD riil per kapita dibagi dengan rata-rata KFD riil per kapita secara Nasional.

- (3) KFD riil per kapita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan KFD dibagi dengan jumlah penduduk dan IKK.
- (4) IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan IKM terhadap rata-rata IKM secara Nasional.
- (5) Perhitungan IRFD dan/atau IPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata nasional untuk IRFD dan/atau IPPMD adalah 1;
 - b. Daerah yang mempunyai nilai IRFD dan/atau IPPMD sama dengan 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD sama dengan rata-rata nasional;
 - c. Daerah yang mempunyai nilai IRFD dan/atau IPPMD lebih dari 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD di atas rata-rata nasional; dan
 - d. Daerah yang mempunyai IRFD dan/atau IPPMD kurang dari 1, dinyatakan sebagai daerah dengan IRFD dan/atau IPPMD di bawah rata-rata nasional.

BAB V

PENENTUAN KELOMPOK DAERAH BERDASARKAN INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Kaitan antara IRFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan IPPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) digambarkan dalam bentuk peta kuadran.
- (2) Berdasarkan peta kuadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kelompok daerah sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di atas rata-rata nasional ($IRFD > 1$ dan $IPPMD > 1$);
 - b. Kelompok 2 adalah daerah dengan IRFD di bawah rata-rata nasional, namun IPPMD di atas rata-rata nasional ($IRFD < 1$, $IPPMD > 1$);
 - c. Kelompok 3 adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di bawah rata-rata nasional ($IRFD < 1$, $IPPMD < 1$); dan
 - d. Kelompok 4 adalah daerah dengan IRFD di atas rata-rata nasional, namun IPPMD di bawah rata-rata nasional ($IRFD > 1$, $IPPMD < 1$).

Pasal 8

- (1) Rincian Hasil pengelompokan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Hasil pengelompokan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah penyelenggara urusan bersama pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi DUB.

BAB VI

PENENTUAN TINGKATAN BESARAN PENYEDIAAN DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)

Pasal 9

- (1) DDUB yang harus disediakan oleh daerah disesuaikan dengan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 1 menyediakan DDUB *sangat tinggi*;
 - b. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 2 menyediakan DDUB *sedang*;
 - c. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 3 menyediakan DDUB *rendah*; dan
 - d. Daerah yang termasuk dalam Kelompok 4 menyediakan DDUB *tinggi*.
- (3) Penentuan besaran persentase DDUB yang harus disediakan oleh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66 /PMK.07/2011 TENTANG
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN
DAERAH DALAM RANGKA
PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN
BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR DAERAH BERDASARKAN
INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMd)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam				
1	Kab. Aceh Barat	0.788	1.191	2	Sedang
2	Kab. Aceh Besar	0.466	0.634	3	Rendah
3	Kab. Aceh Selatan	0.522	0.892	3	Rendah
4	Kab. Aceh Singkil	0.945	1.075	2	Sedang
5	Kab. Aceh Tengah	0.607	0.959	3	Rendah
6	Kab. Aceh Tenggara	0.592	1.120	2	Sedang
7	Kab. Aceh Timur	0.621	1.111	2	Sedang
8	Kab. Aceh Utara	0.195	1.171	2	Sedang
9	Kab. Bireuen	0.358	0.854	3	Rendah
10	Kab. Aceh Pidie	0.279	0.673	3	Rendah
11	Kab. Simeulue	1.098	1.576	1	Sangat Tinggi
12	Kota Banda Aceh	0.804	0.344	3	Rendah
13	Kota Sabang	3.643	0.432	4	Tinggi
14	Kota Langsa	0.900	0.513	3	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	1.235	0.482	4	Tinggi
16	Kab. Gayo Lues	1.634	1.369	1	Sangat Tinggi
17	Kab. Aceh Barat Daya	0.870	1.020	2	Sedang
18	Kab. Aceh Jaya	1.741	1.017	1	Sangat Tinggi
19	Kab. Nagan Raya	1.099	1.132	1	Sangat Tinggi
20	Kab. Aceh Tamiang	0.523	0.989	3	Rendah
21	Kab. Bener Meriah	1.038	1.113	1	Sangat Tinggi
22	Kab. Pidie Jaya	1.681	0.784	4	Tinggi
23	Kota Subulussalam	0.887	1.462	2	Sedang
II	Provinsi Sumatera Utara				
1	Kab. Asahan	0.271	0.735	3	Rendah
2	Kab. Dairi	0.427	1.068	2	Sedang
3	Kab. Deli Serdang	0.200	0.690	3	Rendah
4	Kab. Tanah Karo	0.381	0.678	3	Rendah
5	Kab. Labuhan Batu	0.368	1.135	2	Sedang
6	Kab. Langkat	0.233	0.737	3	Rendah
7	Kab. Mandailing Natal	0.339	1.421	2	Sedang
8	Kab. Nias	0.153	1.881	2	Sedang
9	Kab. Simalungun	0.239	0.790	3	Rendah
10	Kab. Tapanuli Selatan	0.624	1.213	2	Sedang
11	Kab. Tapanuli Tengah	0.390	1.188	2	Sedang
12	Kab. Tapanuli Utara	0.447	1.227	2	Sedang
13	Kab. Toba Samosir	0.508	0.863	3	Rendah
14	Kota Binjai	0.476	0.577	3	Rendah
15	Kota Medan	0.363	0.358	3	Rendah
16	Kota Pematang Siantar	0.543	0.403	3	Rendah
17	Kota Sibolga	0.961	0.564	3	Rendah
18	Kota Tanjung Balai	0.753	0.577	3	Rendah
19	Kota Tebing Tinggi	0.776	0.449	3	Rendah
20	Kota Padang Sidempuan	0.469	0.917	3	Rendah
21	Kab. Pakpak Bharat	1.987	1.445	1	Sangat Tinggi

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPM)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Kab. Nias Selatan	0.405	1.650	2	Sedang
23	Kab. Humbang Hasundutan	0.849	1.180	2	Sedang
24	Kab. Serdang Berdagai	0.300	0.726	3	Rendah
25	Kab. Samosir	0.804	1.311	2	Sedang
26	Kab. Batu Bara	0.403	0.594	3	Rendah
27	Kab. Padang Lawas	1.014	1.149	1	Sangat Tinggi
28	Kab. Padang Lawas Utara	0.589	1.563	2	Sedang
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	0.492	1.135	2	Sedang
30	Kab. Labuhan Batu Utara	0.310	1.135	2	Sedang
31	Kab. Nias Utara	0.529	1.881	2	Sedang
32	Kab. Nias Barat	0.214	1.881	2	Sedang
33	Kota Gunung Sitoli	0.209	1.881	2	Sedang
III	Provinsi Sumatera Barat				
1	Kab. Limapuluh Kota	0.427	0.791	3	Rendah
2	Kab. Agam	0.272	0.820	3	Rendah
3	Kab. Kepulauan Mentawai	2.060	2.163	1	Sangat Tinggi
4	Kab. Padang Pariaman	0.353	0.834	3	Rendah
5	Kab. Pasaman	0.468	0.867	3	Rendah
6	Kab. Pesisir Selatan	0.336	0.818	3	Rendah
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	0.583	1.088	2	Sedang
8	Kab. Solok	0.350	0.836	3	Rendah
9	Kab. Tanah Datar	0.334	0.660	3	Rendah
10	Kota Bukit Tinggi	0.986	0.326	3	Rendah
11	Kota Padang Panjang	2.047	0.327	4	Tinggi
12	Kota Padang	0.496	0.356	3	Rendah
13	Kota Payakumbuh	1.073	0.508	4	Tinggi
14	Kota Sawahlunto	2.254	0.403	4	Tinggi
15	Kota Solok	1.757	0.456	4	Tinggi
16	Kota Pariaman	1.750	0.510	4	Tinggi
17	Kab. Pasaman Barat	0.406	1.107	2	Sedang
18	Kab. Dharmasraya	1.063	0.822	4	Tinggi
19	Kab. Solok Selatan	1.010	1.059	1	Sangat Tinggi
IV	Provinsi Riau				
1	Kab. Bengkalis	1.060	1.356	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Indragiri Hilir	0.428	1.741	2	Sedang
3	Kab. Indragiri Hulu	0.762	1.030	2	Sedang
4	Kab. Kampar	0.678	0.795	3	Rendah
5	Kab. Kuantan Singingi	0.861	0.933	3	Rendah
6	Kab. Pelalawan	1.067	1.228	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Rokan Hilir	1.003	1.502	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Rokan Hulu	0.595	1.005	2	Sedang
9	Kab. Siak	2.161	1.013	1	Sangat Tinggi
10	Kota Dumai	1.183	0.787	4	Tinggi
11	Kota Pekanbaru	0.553	0.351	3	Rendah
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.295	1.356	1	Sangat Tinggi
V	Provinsi Jambi				
1	Kab. Batanghari	0.720	1.033	2	Sedang
2	Kab. Bungo	0.773	1.007	2	Sedang
3	Kab. Kerinci	0.560	0.538	3	Rendah

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kab. Merangin	0.476	1.096	2	Sedang
5	Kab. Muaro Jambi	0.554	0.912	3	Rendah
6	Kab. Sarolangun	0.755	1.134	2	Sedang
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	0.878	1.536	2	Sedang
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	0.969	1.695	2	Sedang
9	Kab. Tebo	0.720	1.094	2	Sedang
10	Kota Jambi	0.342	0.400	3	Rendah
11	Kota Sungai Penuh	1.673	0.538	4	Tinggi
VI	Provinsi Sumatera Selatan				
1	Kab. Lahat	0.672	1.089	2	Sedang
2	Kab. Musi Banyuasin	1.392	1.249	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Musi Rawas	0.631	1.099	2	Sedang
4	Kab. Muara Enim	0.539	1.237	2	Sedang
5	Kab. Ogan Komering Ilir	0.348	1.386	2	Sedang
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0.913	0.859	3	Rendah
7	Kota Palembang	0.298	0.289	3	Rendah
8	Kota Prabumulih	1.188	0.611	4	Tinggi
9	Kota Pagar Alam	1.356	0.527	4	Tinggi
10	Kota Lubuk Linggau	1.024	0.517	4	Tinggi
11	Kab. Banyuasin	0.359	1.430	2	Sedang
12	Kab. Ogan Ilir	0.493	1.282	2	Sedang
13	Kab. OKU Timur	0.393	0.894	3	Rendah
14	Kab. OKU Selatan	0.537	1.457	2	Sedang
15	Kab. Empat Lawang	0.772	1.293	2	Sedang
VII	Provinsi Bengkulu				
1	Kab. Bengkulu Selatan	0.555	0.874	3	Rendah
2	Kab. Bengkulu Utara	0.509	1.328	2	Sedang
3	Kab. Rejang Lebong	0.573	1.230	2	Sedang
4	Kota Bengkulu	0.468	0.428	3	Rendah
5	Kab. Kaur	0.800	1.238	2	Sedang
6	Kab. Seluma	0.664	1.460	2	Sedang
7	Kab. Mukomuko	1.034	1.356	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Lebong	1.548	1.054	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Kepahiang	1.200	1.017	1	Sangat Tinggi
10	Kab. Bengkulu Tengah	0.837	1.328	2	Sedang
VIII	Provinsi Lampung				
1	Kab. Lampung Barat	0.410	1.061	2	Sedang
2	Kab. Lampung Selatan	0.227	0.671	3	Rendah
3	Kab. Lampung Tengah	0.118	0.981	3	Rendah
4	Kab. Lampung Utara	0.266	1.473	2	Sedang
5	Kab. Lampung Timur	0.191	0.920	3	Rendah
6	Kab. Tanggamus	0.173	0.926	3	Rendah
7	Kab. Tulang Bawang	0.179	0.968	3	Rendah
8	Kab. Way Kanan	0.648	1.254	2	Sedang
9	Kota Bandar Lampung	0.305	0.340	3	Rendah
10	Kota Metro	0.900	0.546	3	Rendah
11	Kab. Pesawaran	0.343	0.680	3	Rendah
12	Kab. Pringsewu	0.152	0.926	3	Rendah
13	Kab. Mesuji	0.563	0.968	3	Rendah

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Kab. Tulang Bawang Barat	0.195	0.968	3	Rendah
IX	Provinsi DKI Jakarta				
X	Provinsi Jawa Barat				
1	Kab. Bandung	0.179	0.480	3	Rendah
2	Kab. Bekasi	0.269	0.494	3	Rendah
3	Kab. Bogor	0.204	0.659	3	Rendah
4	Kab. Ciamis	0.152	0.671	3	Rendah
5	Kab. Cianjur	0.161	0.948	3	Rendah
6	Kab. Cirebon	0.181	0.636	3	Rendah
7	Kab. Garut	0.136	0.828	3	Rendah
8	Kab. Indramayu	0.175	0.726	3	Rendah
9	Kab. Karawang	0.230	0.514	3	Rendah
10	Kab. Kuningan	0.188	0.565	3	Rendah
11	Kab. Majalengka	0.234	0.627	3	Rendah
12	Kab. Purwakarta	0.450	0.894	3	Rendah
13	Kab. Subang	0.203	0.497	3	Rendah
14	Kab. Sukabumi	0.162	0.935	3	Rendah
15	Kab. Sumedang	0.201	0.604	3	Rendah
16	Kab. Tasikmalaya	0.131	0.941	3	Rendah
17	Kota Bandung	0.273	0.347	3	Rendah
18	Kota Bekasi	0.295	0.347	3	Rendah
19	Kota Bogor	0.266	0.401	3	Rendah
20	Kota Cirebon	0.668	0.422	3	Rendah
21	Kota Depok	0.264	0.297	3	Rendah
22	Kota Sukabumi	0.520	0.353	3	Rendah
23	Kota Tasikmalaya	0.421	0.422	3	Rendah
24	Kota Cimahi	0.193	0.349	3	Rendah
25	Kota Banjar	0.728	0.558	3	Rendah
26	Kab. Bandung Barat	0.199	0.552	3	Rendah
XI	Provinsi Jawa Tengah				
1	Kab. Banjarnegara	0.207	0.676	3	Rendah
2	Kab. Banyumas	0.144	0.521	3	Rendah
3	Kab. Batang	0.194	0.637	3	Rendah
4	Kab. Blora	0.201	0.885	3	Rendah
5	Kab. Boyolali	0.252	0.842	3	Rendah
6	Kab. Brebes	0.190	0.784	3	Rendah
7	Kab. Cilacap	0.268	0.643	3	Rendah
8	Kab. Demak	0.221	0.605	3	Rendah
9	Kab. Grobogan	0.160	0.860	3	Rendah
10	Kab. Jepara	0.187	0.580	3	Rendah
11	Kab. Karanganyar	0.206	0.619	3	Rendah
12	Kab. Kebumen	0.165	0.646	3	Rendah
13	Kab. Kendal	0.204	0.547	3	Rendah
14	Kab. Klaten	0.177	0.536	3	Rendah
15	Kab. Kudus	0.281	0.451	3	Rendah
16	Kab. Magelang	0.158	0.609	3	Rendah
17	Kab. Pati	0.165	0.649	3	Rendah
18	Kab. Pekalongan	0.163	0.622	3	Rendah
19	Kab. Pemalang	0.138	0.711	3	Rendah

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Kab. Purbalingga	0.206	0.571	3	Rendah
21	Kab. Purworejo	0.166	0.489	3	Rendah
22	Kab. Rembang	0.275	0.521	3	Rendah
23	Kab. Semarang	0.212	0.500	3	Rendah
24	Kab. Sragen	0.189	0.635	3	Rendah
25	Kab. Sukoharjo	0.213	0.460	3	Rendah
26	Kab. Tegal	0.151	0.654	3	Rendah
27	Kab. Temanggung	0.212	0.488	3	Rendah
28	Kab. Wonogiri	0.184	0.773	3	Rendah
29	Kab. Wonosobo	0.243	0.626	3	Rendah
30	Kota Magelang	0.853	0.306	3	Rendah
31	Kota Pekalongan	0.489	0.407	3	Rendah
32	Kota Salatiga	0.624	0.311	3	Rendah
33	Kota Semarang	0.365	0.307	3	Rendah
34	Kota Surakarta	0.516	0.328	3	Rendah
35	Kota Tegal	0.554	0.462	3	Rendah
XII	Provinsi DI Yogyakarta				
1	Kab. Bantul	0.240	0.411	3	Rendah
2	Kab. Gunung Kidul	0.199	0.985	3	Rendah
3	Kab. Kulon Progo	0.310	0.513	3	Rendah
4	Kab. Sleman	0.244	0.361	3	Rendah
5	Kota Yogyakarta	0.581	0.255	3	Rendah
XIII	Provinsi Jawa Timur				
1	Kab. Bangkalan	0.196	1.174	2	Sedang
2	Kab. Banyuwangi	0.208	0.712	3	Rendah
3	Kab. Blitar	0.233	0.462	3	Rendah
4	Kab. Bojonegoro	0.268	0.721	3	Rendah
5	Kab. Bondowoso	0.241	0.977	3	Rendah
6	Kab. Gresik	0.289	0.529	3	Rendah
7	Kab. Jember	0.169	0.934	3	Rendah
8	Kab. Jombang	0.197	0.470	3	Rendah
9	Kab. Kediri	0.166	0.428	3	Rendah
10	Kab. Lamongan	0.180	0.727	3	Rendah
11	Kab. Lumajang	0.200	0.819	3	Rendah
12	Kab. Madiun	0.297	0.563	3	Rendah
13	Kab. Magetan	0.234	0.450	3	Rendah
14	Kab. Malang	0.173	0.558	3	Rendah
15	Kab. Mojokerto	0.202	0.423	3	Rendah
16	Kab. Nganjuk	0.170	0.600	3	Rendah
17	Kab. Ngawi	0.167	0.780	3	Rendah
18	Kab. Pacitan	0.193	0.695	3	Rendah
19	Kab. Pamekasan	0.221	0.967	3	Rendah
20	Kab. Pasuruan	0.183	0.719	3	Rendah
21	Kab. Ponorogo	0.185	0.622	3	Rendah
22	Kab. Probolinggo	0.198	1.132	2	Sedang
23	Kab. Sampang	0.208	1.519	2	Sedang
24	Kab. Sidoarjo	0.301	0.353	3	Rendah
25	Kab. Situbondo	0.257	1.009	2	Sedang
26	Kab. Sumenep	0.194	1.105	2	Sedang

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPM)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Kab. Trenggalek	0.186	0.554	3	Rendah
28	Kab. Tuban	0.199	0.710	3	Rendah
29	Kab. Tulungagung	0.236	0.385	3	Rendah
30	Kota Blitar	0.878	0.316	3	Rendah
31	Kota Kediri	0.872	0.303	3	Rendah
32	Kota Madiun	0.719	0.288	3	Rendah
33	Kota Malang	0.392	0.336	3	Rendah
34	Kota Mojokerto	1.403	0.285	4	Tinggi
35	Kota Pasuruan	0.719	0.480	3	Rendah
36	Kota Probolinggo	0.836	0.428	3	Rendah
37	Kota Surabaya	0.604	0.307	3	Rendah
38	Kota Batu	0.864	0.362	3	Rendah
XIV	Provinsi Kalimantan Barat				
1	Kab. Bengkayang	0.566	1.676	2	Sedang
2	Kab. Landak	0.544	1.822	2	Sedang
3	Kab. Kapuas Hulu	0.986	1.839	2	Sedang
4	Kab. Ketapang	0.690	1.488	2	Sedang
5	Kab. Pontianak	0.534	1.568	2	Sedang
6	Kab. Sambas	0.340	1.767	2	Sedang
7	Kab. Sanggau	0.443	1.549	2	Sedang
8	Kab. Sintang	0.557	1.880	2	Sedang
9	Kota Pontianak	0.499	1.314	2	Sedang
10	Kota Singkawang	0.767	0.964	3	Rendah
11	Kab. Sekadau	0.738	1.711	2	Sedang
12	Kab. Melawi	0.864	2.025	2	Sedang
13	Kab. Kayong Utara	1.437	1.494	1	Sangat Tinggi
14	Kab. Kubu Raya	0.323	1.803	2	Sedang
XV	Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Kab. Barito Selatan	1.124	1.290	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Barito Utara	1.318	1.131	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Kapuas	0.550	1.637	2	Sedang
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.001	0.713	4	Tinggi
5	Kab. Kotawaringin Timur	0.728	1.350	2	Sedang
6	Kota Palangkaraya	0.757	0.542	3	Rendah
7	Kab. Katingan	1.586	1.430	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Seruyan	2.197	1.739	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Sukamara	3.853	0.977	4	Tinggi
10	Kab. Lamandau	2.875	1.330	1	Sangat Tinggi
11	Kab. Gunung Mas	1.702	1.800	1	Sangat Tinggi
12	Kab. Pulang Pisau	1.083	1.669	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Murung Raya	2.551	1.934	1	Sangat Tinggi
14	Kab. Barito Timur	1.328	1.167	1	Sangat Tinggi
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan				
1	Kab. Banjar	0.565	1.432	2	Sedang
2	Kab. Barito Kuala	0.630	1.593	2	Sedang
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	0.657	0.988	3	Rendah
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	0.608	0.996	3	Rendah
5	Kab. Hulu Sungai Utara	0.597	1.060	2	Sedang
6	Kab. Kota Baru	1.061	1.408	1	Sangat Tinggi

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMDD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kab. Tabalong	1.454	1.096	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Tanah Laut	0.788	1.174	2	Sedang
9	Kab. Tapin	1.421	1.039	1	Sangat Tinggi
10	Kota Banjar Baru	0.750	0.613	3	Rendah
11	Kota Banjarmasin	0.407	0.593	3	Rendah
12	Kab. Balangan	2.323	1.376	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Tanah Bumbu	1.996	1.303	1	Sangat Tinggi
XVII	Provinsi Kalimantan Timur				
1	Kab. Berau	1.826	0.879	4	Tinggi
2	Kab. Bulungan	3.167	1.400	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Kutai Kartanegara	2.848	1.006	1	Sangat Tinggi
4	Kab. Kutai Barat	2.473	1.316	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Kutai Timur	3.385	1.097	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Malinau	6.676	1.497	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Nunukan	2.013	1.731	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Pasir	1.955	1.377	1	Sangat Tinggi
9	Kota Balikpapan	0.949	0.293	3	Rendah
10	Kota Bontang	2.461	0.342	4	Tinggi
11	Kota Samarinda	1.273	0.417	4	Tinggi
12	Kota Tarakan	1.704	0.723	4	Tinggi
13	Kab. Penajam Paser Utara	2.355	0.683	4	Tinggi
14	Kab. Tana Tidung	28.476	0.710	4	Tinggi
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara				
1	Kab. Bolaang Mongondow	0.108	0.932	3	Rendah
2	Kab. Minahasa	0.451	0.416	3	Rendah
3	Kab. Sangihe	0.748	0.798	3	Rendah
4	Kota Bitung	0.765	0.518	3	Rendah
5	Kota Manado	(0.001)	0.388	3	Rendah
6	Kab. Kepulauan Talaud	0.916	0.786	3	Rendah
7	Kab. Minahasa Selatan	(0.070)	0.644	3	Rendah
8	Kota Tomohon	1.450	0.262	4	Tinggi
9	Kab. Minahasa Utara	0.590	0.727	3	Rendah
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.484	1.203	1	Sangat Tinggi
11	Kota Kotamobagu	1.088	0.284	4	Tinggi
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.671	0.832	4	Tinggi
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.362	0.532	4	Tinggi
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.518	0.932	4	Tinggi
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.947	0.932	4	Tinggi
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah				
1	Kab. Banggai	0.465	0.719	3	Rendah
2	Kab. Banggai Kepulauan	0.777	0.929	3	Rendah
3	Kab. Buol	1.487	0.963	4	Tinggi
4	Kab. Toli-Toli	0.533	0.834	3	Rendah
5	Kab. Donggala	0.469	1.123	2	Sedang
6	Kab. Morowali	0.992	1.196	2	Sedang
7	Kab. Poso	0.779	0.868	3	Rendah
8	Kota Palu	0.462	0.462	3	Rendah
9	Kab. Parigi Moutong	0.425	0.882	3	Rendah
10	Kab. Tojo Una Una	0.731	1.015	2	Sedang

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Kab. Sigi	0.744	1.123	2	Sedang
XX	Provinsi Sulawesi Selatan				
1	Kab. Bantaeng	0.763	0.886	3	Rendah
2	Kab. Barru	0.878	0.598	3	Rendah
3	Kab. Bone	0.291	1.002	2	Sedang
4	Kab. Bulukumba	0.424	0.773	3	Rendah
5	Kab. Enrekang	0.762	0.997	3	Rendah
6	Kab. Gowa	0.184	0.925	3	Rendah
7	Kab. Jeneponto	0.345	1.003	2	Sedang
8	Kab. Luwu	0.380	0.946	3	Rendah
9	Kab. Luwu Utara	0.403	0.919	3	Rendah
10	Kab. Maros	0.552	1.033	2	Sedang
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	0.616	0.823	3	Rendah
12	Kota Palopo	0.785	0.451	3	Rendah
13	Kab. Luwu Timur	0.712	0.713	3	Rendah
14	Kab. Pinrang	0.454	0.643	3	Rendah
15	Kab. Sinjai	0.596	0.797	3	Rendah
16	Kab. Selayar	0.982	0.647	3	Rendah
17	Kab. Sidenreng Rappang	0.646	0.695	3	Rendah
18	Kab. Soppeng	0.502	0.646	3	Rendah
19	Kab. Takalar	0.481	0.916	3	Rendah
20	Kab. Tana Toraja	0.480	1.501	2	Sedang
21	Kab. Wajo	0.341	0.841	3	Rendah
22	Kota Pare-pare	1.179	0.328	4	Tinggi
23	Kota Makassar	0.338	0.350	3	Rendah
24	Kab. Toraja Utara	0.460	1.501	2	Sedang
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara				
1	Kab. Buton	0.508	0.922	3	Rendah
2	Kab. Konawe	0.207	0.907	3	Rendah
3	Kab. Kolaka	0.587	0.915	3	Rendah
4	Kab. Muna	0.441	0.807	3	Rendah
5	Kota Kendari	0.581	0.472	3	Rendah
6	Kota Bau-bau	0.678	0.498	3	Rendah
7	Kab. Konawe Selatan	0.635	1.401	2	Sedang
8	Kab. Bombana	1.000	1.113	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Wakatobi	1.156	0.916	4	Tinggi
10	Kab. Kolaka Utara	1.245	0.864	4	Tinggi
11	Kab. Konawe Utara	3.004	1.134	1	Sangat Tinggi
12	Kab. Buton Utara	2.307	0.889	4	Tinggi
XXII	Provinsi Bali				
1	Kab. Badung	1.327	0.374	4	Tinggi
2	Kab. Bangli	0.690	0.820	3	Rendah
3	Kab. Buleleng	0.237	0.628	3	Rendah
4	Kab. Gianyar	0.488	0.542	3	Rendah
5	Kab. Jembrana	0.496	0.586	3	Rendah
6	Kab. Karangasem	0.432	1.178	2	Sedang
7	Kab. Klungkung	0.761	0.905	3	Rendah
8	Kab. Tabanan	0.399	0.456	3	Rendah
9	Kota Denpasar	0.496	0.250	3	Rendah

No	Kab/Kota	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMMD)	Kelompok	Tingkat Penyediaan DDUB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
1	Kab. Bima	0.332	0.939	3	Rendah
2	Kab. Dompu	0.375	0.917	3	Rendah
3	Kab. Lombok Barat	0.287	1.154	2	Sedang
4	Kab. Lombok Tengah	0.193	1.253	2	Sedang
5	Kab. Lombok Timur	0.176	1.085	2	Sedang
6	Kab. Sumbawa	0.386	0.853	3	Rendah
7	Kota Mataram	0.393	0.565	3	Rendah
8	Kota Bima	0.763	0.693	3	Rendah
9	Kab. Sumbawa Barat	2.227	0.798	4	Tinggi
10	Kab. Lombok Utara	0.625	1.154	2	Sedang
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
1	Kab. Alor	0.366	1.267	2	Sedang
2	Kab. Belu	0.244	1.253	2	Sedang
3	Kab. Ende	0.441	0.920	3	Rendah
4	Kab. Flores Timur	0.285	0.811	3	Rendah
5	Kab. Kupang	0.254	1.432	2	Sedang
6	Kab. Lembata	0.739	0.998	3	Rendah
7	Kab. Manggarai	0.507	1.109	2	Sedang
8	Kab. Ngada	0.794	0.721	3	Rendah
9	Kab. Sikka	0.372	1.210	2	Sedang
10	Kab. Sumba Barat	1.006	1.408	1	Sangat Tinggi
11	Kab. Sumba Timur	0.549	1.449	2	Sedang
12	Kab. Timor Tengah Selatan	0.243	1.830	2	Sedang
13	Kab. Timor Tengah Utara	0.444	1.232	2	Sedang
14	Kota Kupang	0.432	0.394	3	Rendah
15	Kab. Rote Ndao	0.895	1.116	2	Sedang
16	Kab. Manggarai Barat	0.491	1.481	2	Sedang
17	Kab. Nagekeo	0.650	0.851	3	Rendah
18	Kab. Sumba Tengah	0.227	1.912	2	Sedang
19	Kab. Sumba Barat Daya	2.140	2.030	1	Sangat Tinggi
20	Kab. Manggarai Timur	0.469	1.136	2	Sedang
21	Kab. Sabu Raijua	0.476	1.432	2	Sedang
XXV	Provinsi Maluku				
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.449	0.996	4	Tinggi
2	Kab. Maluku Tengah	0.355	0.949	3	Rendah
3	Kab. Maluku Tenggara	0.967	0.810	3	Rendah
4	Kab. Pulau Buru	1.256	1.651	1	Sangat Tinggi
5	Kota Ambon	0.461	0.391	3	Rendah
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.075	0.882	4	Tinggi
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.721	1.208	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Kepulauan Aru	1.937	1.706	1	Sangat Tinggi
9	Kota Tual	2.256	0.945	4	Tinggi
10	Kab. Maluku Barat Daya	1.630	0.996	4	Tinggi
11	Kab. Buru Selatan	2.831	1.651	1	Sangat Tinggi
XXVI	Provinsi Papua				
1	Kab. Biak Numfor	1.120	1.111	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Jayapura	1.293	1.129	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Jayawijaya	0.969	2.328	2	Sedang

No (1)	Kab/Kota (2)	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) (3)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPM) (4)	Kelompok (5)	Tingkat Penyediaan DDUB (6)
4	Kab. Merauke	1.223	1.271	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Mimika	2.543	1.447	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Nabire	1.434	1.758	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Paniai	0.473	2.784	2	Sedang
8	Kab. Puncak Jaya	1.098	3.239	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Yapen Waropen	1.451	0.965	4	Tinggi
10	Kota Jayapura	0.737	0.569	3	Rendah
11	Kab. Sarmi	7.252	2.194	1	Sangat Tinggi
12	Kab. Keerom	2.639	1.373	1	Sangat Tinggi
13	Kab. Yahukimo	0.736	3.361	2	Sedang
14	Kab. Pegunungan Bintang	1.048	2.578	1	Sangat Tinggi
15	Kab. Tolikara	1.807	3.312	1	Sangat Tinggi
16	Kab. Boven Digoel	5.467	2.089	1	Sangat Tinggi
17	Kab. Mappi	1.895	2.262	1	Sangat Tinggi
18	Kab. Asmat	2.033	2.578	1	Sangat Tinggi
19	Kab. Waropen	8.789	1.924	1	Sangat Tinggi
20	Kab. Supiori	10.809	1.652	1	Sangat Tinggi
21	Kab. Memberamo Raya	8.206	2.359	1	Sangat Tinggi
22	Kab. Memberamo Tengah	2.725	3.426	1	Sangat Tinggi
23	Kab. Yalimo	4.182	2.334	1	Sangat Tinggi
24	Kab. Lanny Jaya	1.519	2.713	1	Sangat Tinggi
25	Kab. Nduga	2.755	3.519	1	Sangat Tinggi
26	Kab. Dogiyai	1.306	2.293	1	Sangat Tinggi
27	Kab. Puncak	1.330	3.643	1	Sangat Tinggi
28	Kab. Intan Jaya	0.728	2.784	2	Sedang
29	Kab. Deiyai	0.378	2.784	2	Sedang
XXVII	Provinsi Maluku Utara				
1	Kab. Halmahera Tengah	2.628	0.710	4	Tinggi
2	Kota Ternate	0.585	0.543	3	Rendah
3	Kab. Halmahera Barat	0.855	1.270	2	Sedang
4	Kab. Halmahera Timur	1.885	1.273	1	Sangat Tinggi
5	Kab. Halmahera Selatan	0.733	1.931	2	Sedang
6	Kab. Halmahera Utara	0.764	1.209	2	Sedang
7	Kab. Kepulauan Sula	1.013	1.101	1	Sangat Tinggi
8	Kota Tidore Kepulauan	0.705	0.929	3	Rendah
9	Kab. Pulau Morotai	1.134	1.209	1	Sangat Tinggi
XXVIII	Provinsi Banten				
1	Kab. Lebak	0.181	1.037	2	Sedang
2	Kab. Pandeglang	0.157	1.020	2	Sedang
3	Kab. Serang	0.183	0.943	3	Rendah
4	Kab. Tangerang	0.163	0.511	3	Rendah
5	Kota Cilegon	0.776	0.496	3	Rendah
6	Kota Tangerang	0.349	0.386	3	Rendah
7	Kota Serang	0.319	0.653	3	Rendah
8	Kota Tangerang Selatan	0.260	0.511	3	Rendah
XXIX	Provinsi Bangka Belitung				
1	Kab. Bangka	0.534	0.805	3	Rendah
2	Kab. Belitung	0.931	0.692	3	Rendah
3	Kota Pangkal Pinang	0.837	0.304	3	Rendah

No (1)	Kab/Kota (2)	Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) (3)	Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPM) (4)	Kelompok (5)	Tingkat Penyediaan DDUB (6)
4	Kab. Bangka Selatan	0.848	0.926	3	Rendah
5	Kab. Bangka Tengah	0.691	0.841	3	Rendah
6	Kab. Bangka Barat	0.778	1.334	2	Sedang
7	Kab. Belitung Timur	1.424	0.717	4	Tinggi
XXX	Provinsi Gorontalo				
1	Kab. Boalemo	0.904	0.785	3	Rendah
2	Kab. Gorontalo	0.359	0.804	3	Rendah
3	Kota Gorontalo	0.861	0.496	3	Rendah
4	Kab. Pohuwato	1.073	0.847	4	Tinggi
5	Kab. Bone Bolango	0.659	0.688	3	Rendah
6	Kab. Gorontalo Utara	1.280	1.094	1	Sangat Tinggi
XXXI	Provinsi Riau Kepulauan				
1	Kab. Natuna	4.251	0.954	4	Tinggi
2	Kab. Kepulauan Anambas	7.598	0.954	4	Tinggi
3	Kab. Karimun	0.874	0.724	3	Rendah
4	Kota Batam	0.536	0.382	3	Rendah
5	Kota Tanjung Pinang	0.922	0.359	3	Rendah
6	Kab. Lingga	1.873	0.925	4	Tinggi
7	Kab. Bintan	1.515	0.725	4	Tinggi
XXXII	Provinsi Papua Barat				
1	Kab. Fak Fak	2.656	1.164	1	Sangat Tinggi
2	Kab. Manokwari	1.241	1.633	1	Sangat Tinggi
3	Kab. Sorong	1.381	2.050	1	Sangat Tinggi
4	Kota Sorong	0.734	0.594	3	Rendah
5	Kab. Raja Ampat	3.653	1.184	1	Sangat Tinggi
6	Kab. Sorong Selatan	2.275	1.842	1	Sangat Tinggi
7	Kab. Teluk Bintuni	5.388	1.657	1	Sangat Tinggi
8	Kab. Teluk Wondama	5.987	1.578	1	Sangat Tinggi
9	Kab. Kaimana	4.667	1.500	1	Sangat Tinggi
10	Kab. Tambrauw	10.282	2.050	1	Sangat Tinggi
11	Kab. Maybrat	1.988	2.050	1	Sangat Tinggi
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat				
1	Kab. Majene	0.574	0.680	3	Rendah
2	Kab. Mamuju	0.458	1.021	2	Sedang
3	Kab. Polewali Mandar	0.383	0.897	3	Rendah
4	Kab. Mamasa	0.742	1.949	2	Sedang
5	Kab. Mamuju Utara	0.962	1.124	2	Sedang

MENTERI KEUANGAN,

D.W. MARTOWARDOJO